



DS:4489-6930-2066-8641

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.04.2.692064/2026**

Revisi ke 02

Tanggal : 09 Februari 2026

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(135)	KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi	:	(04)	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
3. Provinsi	:	(26)	BENGKULU
4. Kode/Nama Satker	:	(692064)	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU
Sebesar	:	Rp. 1.021.315.000	(SATU MILIAR DUA PULUH SATU JUTA TIGA RATUS LIMA BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03	PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	1.021.315.000
135.04.BF.7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp.	1.021.315.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	-	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	1.021.315.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN B E N G K U L U	(016) Rp.	1.021.315.000
-------------------------	-----------	---------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025

A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.

LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692064/2026
I A. INFORMASI KINERJA



Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
 Provinsi : (26) BENGKULU
 Kode/Nama Satker : (692064) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

Halaman : I A. 1

Program	:	135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			1.021.315.000
Kegiatan	:	7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah			1.021.315.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	4,00	layanan	645.995.000
Rincian Output	:	01	BAH.001 Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	4.00	layanan	645.995.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga	1,00	Perkara	1.590.000
Rincian Output	:	01	BCB.001 Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah	1.00	Perkara	1.590.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	5,00	Lembaga	308.350.000
Rincian Output	:	01	BIC.001 Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah	5.00	Lembaga	308.350.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	7110.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	65.380.000
Rincian Output	:	01	FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah	1.00	Laporan	65.380.000

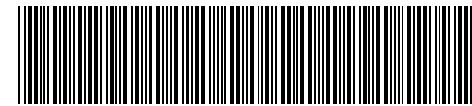
Jakarta, 01 Desember 2025
 Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
 WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA- 135.04.2.692064/2026



DS:4489-6930-2066-8641

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
 Provinsi : (26) BENGKULU
 Kode/Nama Satker : (692064) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

Halaman : I B. 1

				Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	1.021.315.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0 Rp. 0
2. PNBP	Rp.		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0	d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0	e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :			f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0

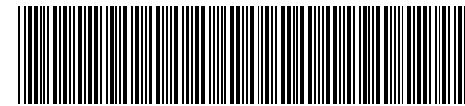
(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register	PAGU TAHUNINI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah	RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN			DANA PENDAMPING			
			1) PP	2) PL	3) RK	4) LC	5) -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA- 135.04.2.692064/2026



DS:4489-6930-2066-8641

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM

Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Provinsi : (26) BENGKULU

Kode/Nama Satker : (692064) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1

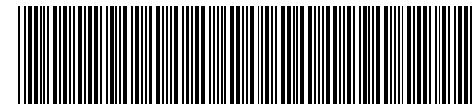
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692064	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU		-	1.021.315	-	-	-	1.021.315	
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		-	1.021.315	-	-	-	1.021.315	
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		-	1.021.315	-	-	-	1.021.315	
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)		-	645.995	-	-	-	645.995	26 . 51
04	PNBP		-	645.995	-	-	-	645.995	016@
7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)		-	1.590	-	-	-	1.590	26 . 51
04	PNBP		-	1.590	-	-	-	1.590	016@
7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)		-	308.350	-	-	-	308.350	26 . 51
04	PNBP		-	308.350	-	-	-	308.350	016@
7110.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (26.51 BENGKULU / KOTA BENGKULU)		-	65.380	-	-	-	65.380	26 . 51

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA- 135.04.2.692064/2026



DS:4489-6930-2066-8641

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM

Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Provinsi : (26) BENGKULU

Kode/Nama Satker : (692064) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	PNBP	-	65.380	-	-	-	65.380	016@	
	JUMLAH	-	1.021.315	-	-	-	1.021.315		

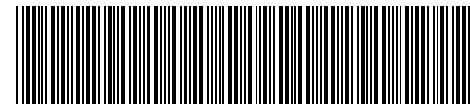
Jakarta, 01 Desember 2025
 Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
 WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA- 135.04.2.692064/2026



DS:4489-6930-2066-8641

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM

Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Provinsi : (26) BENGKULU

Kode/Nama Satker : (692064) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692064	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	111.652	49.390	53.645	55.288	49.680	60.114	55.536	50.050	64.004	53.523	418.434	1.021.315
		BELANJA BARANG	0	111.652	49.390	53.645	55.288	49.680	60.114	55.536	50.050	64.004	53.523	418.434	1.021.315
135.04.BF.7110		Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	0	111.652	49.390	53.645	55.288	49.680	60.114	55.536	50.050	64.004	53.523	418.434	1.021.315
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	111.652	49.390	53.645	55.288	49.680	60.114	55.536	50.050	64.004	53.523	418.434	1.021.315

Jakarta, 01 Desember 2025

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692064/2026
IV A. B L O K I R



DS:4489-6930-2066-8641

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
 Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
 Provinsi : [26] BENGKULU
 Kode dan Nama Satker : [692064] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

Halaman : IV.A. 1
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692064	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 402.937		Prioritas Direktif Presiden TA 2026
135.04.BF	52 Belanja Barang Rp. 402.937	Disposisi: 524113	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.296
7110	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Disposisi: 524114	Prioritas Direktif Presiden TA 2026
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya 521211 Belanja Bahan(PNBP) Rp. 52.093 Tidak Dapat Dicairkan Prioritas Direktif Presiden TA 2026	Disposisi: 521211	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 25.410
	Disposisi: 521213 Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Prioritas Direktif Presiden TA 2026	Disposisi: 524113	Prioritas Direktif Presiden TA 2026
	Disposisi: 522141 Belanja Sewa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Prioritas Direktif Presiden TA 2026	Disposisi: 524114	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Prioritas Direktif Presiden TA 2026
	Disposisi: 522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Prioritas Direktif Presiden TA 2026	Disposisi: 521211	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Prioritas Direktif Presiden TA 2026
	Disposisi: 522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Prioritas Direktif Presiden TA 2026	Disposisi: 524113	Prioritas Direktif Presiden TA 2026
	Disposisi: 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan	Disposisi: 521211	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Prioritas Direktif Presiden TA 2026
	Rp. 86.265	Disposisi: 524113	Prioritas Direktif Presiden TA 2026
		Disposisi: 521213	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Prioritas Direktif Presiden TA 2026
		Disposisi: 524111	Prioritas Direktif Presiden TA 2026
		Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692064/2026
IV A. B L O K I R



DS:4489-6930-2066-8641

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
 Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
 Provinsi : [26] BENGKULU
 Kode dan Nama Satker : [692064] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

Halaman : IV.A. 2
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Prioritas Direktif Presiden TA 2026 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 22.558	
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Prioritas Direktif Presiden TA 2026 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 1.575	
7110.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 521211 Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Prioritas Direktif Presiden TA 2026 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 80	
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Prioritas Direktif Presiden TA 2026 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 22.827	

Jakarta, 01 Desember 2025
 Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
 WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692064/2026
IV. C A T A T A N



DS:4489-6930-2066-8641

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM

Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Provinsi : [26] BENGKULU

Kode dan Nama Satker : [692064] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO